**ANALISIS PENERAPAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) UNTUK
MINIMALKAN UNTUK PPH PASAL 23
(Studi kasus di PT.X)**

Nurul Cholifah^{1*)}

Email: nurulero@gmail.com

Supriadi²

^{1*,2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Undang-undang PPh memberi peluang kepada wajib pajak agar dapat meminta pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 22 dan 23 dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) di Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar. Penelitian ini menganalisis analisis perencanaan pajak dan penggunaan surat keterangan bebas (SKB) untuk meminimalkan beban pajak PPh pasal 23 (Studi kasus di PT.X Surabaya) untuk menganalisis Perencanaan pajak dan untuk meminimalkan beban pajak PPh 23 pada PT.X Surabaya. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yaitu dengan cara mengumpulkan data yang Valid dari sumber yang diperoleh dari karyawan perusahaan tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan surat keterangan bebas untuk meminimalkan PPh 23 di PT.X Surabaya dengan melakukan analisa Perencanaan pajak dan untuk meminimalkan beban pajak PPh 23 pada PT.X.

Kata kunci: PPh Pasal 23, Penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB).

ABSTRACT

The Income Tax Law provides an opportunity for taxpayers to be able to ask for taxes from PPh Articles 22 and 23 by submitting a Certificate of Exemption (SKB) at the Registered Tax Service Office. This study analyzes tax planning and the use of free tax certificates (SKB) to minimize tax free Pph article 23 (Kasuss study at PT.X Surabaya) to analyze tax planning and to minimize the PPh 23 tax burden at PT X Surabaya. The research chosen by the author is a qualitative descriptive research approach with a case study design by collecting valid data from sources obtained from these employees. This research is based on the analysis of the use of PPh 23 free certificates at PT.X Surabaya by analyzing tax planning and to minimize the tax burden of PPh 23 at PT.X Surabaya.

Keywords: Income Tax Article 23, Use of Free Certificate (SKB)

I. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatkan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negarakhhususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Untuk mengoptimalkan laba, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Pajak bagi perusahaan merupakan bebanyang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga dilakukan strategi ini adalah salah satu bagian dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah, dan juga agar pengeluaran kasyang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan untuk memperlancar operasional perusahaan.

Secara umum penerapan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan pajak atau yang bisa disebut *Tax planning* Menurut Bardjo, (2011: 18) adalah Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*taxmanagement*) melalui perencanaan pajak maka pajak penghasilan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Penghematan pajak (*Tax saving*) dilakukan dengan cara menyusun suatu perencanaan (*Tax management*) merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar disatu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkingyang baik untuk memaksimalkan laba sesudah pajak, sehingga perusahaan dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Dasar dari perhitungan pajak penghasilan adalah berdasarkan laba yang didapatdari perusahaan tersebut, jadi *tax planning* bisa dilakukan agar beban pajaknya berkurang dan selisih dari beban pajak yang seharusnya bisa untuk memajukan perusahaan sendiri dengan menambah biaya – biaya , dari pada untuk membayar ke pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tetapi perencanaan pajak harus mengacu pada undang – undang perpajakan agar tidak menyalahi aturan yang ada.

Cara meminimalkan beban pajak perusahaan juga bias menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotong pemungutan PPh (Pajak Penghasilan) menurut siagian (2016 :35) adalah dokumen sakti bagi wajib pajak penerima

penghasilan agar PPh 22 dan/atau 23 badan tidak dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut sebagai pemberi penghasilan. SKB diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak (pemohon) terdaftar dengan memperlihatkan SKB, pemotong atau pemungut PPh tidak dapat lagi melakukan kewajiban pemotong. Namun dalam prakteknya hal ini sering kali ditemukan bahwa pihak Instansi atau pemotong atau pemberi penghasilan tetap saja memotong PPh pasal 23 walau sudah ditunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) ini yang terjadi pada PT. PT.X di Surabaya yang bergerak di bidang agent property atau juga disebut dengan perantara jual rumah yang lebih dikenal di masyarakat sebutan makelar properti yang omsetnya dibawah 4,8 Miliar.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan Judul penelitian sebagai berikut: “ANALISIS PENERAPAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) UNTUK MEMINIMAL KAN BEBAN PAJAK PPh PASAL 23 (Studi Kasus di PT.X di Surabaya)”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung.

Sedangkan Smeets dalam Waluyo, (2011:2) pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak

a. Fungsi *budgetair*

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Hukum Pajak

Menurut Sumarsan (2013:10-11), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi:

- a) Hukum pajak meteril, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajakyang dikenakan, segalasesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak , dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

- b) Hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara yang mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:25)** yaitu :

a. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan Waluyo (2011) jenis pajak dibagi menurut golongan, sifat dan pemungutnya, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak

Menurut Bambang Haryanto (2014:2) subjek dan obyek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp

4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Pajak yang terutang dan yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) . catatan : meliputi usaha dagang dan jasa seperti, toko/kios/kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon,dan usaha lainnya.

Bukan Objek Pajak

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti, dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain music, pembawa acara dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 46 Tahun 2013, penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final, seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Menurut (Resmi, 2014:14)

- a. Tarif proposional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif regresif (*a regresivetax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
- d. Tarif regresif atau tetap (*a regresivetax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Contoh: tarif Bea Materai.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Dalam ketentuan tentang pajak penghasilan, diatur pengenaan pajak penghasilan atas objek-objek tertentu yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 4 ayat (2), Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- Penghasilan berupa hadiah undian

- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak-berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak
- Pemerataan dalam pengenaan pajaknya dan-memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Obligasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat Utang Negara yang dimaksud di atas meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara. PPh Pasal 23 menurut Waluyo (2010:273) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Surat Keterangan Bebas (SKB)

Surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak dikenai PPh yang bersifat Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

Peraturan Terkait :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 perubahan atas PER-1/PJ/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu disebutkan bahwa jenis surat keterangan bebas terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21
- b. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22
- c. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor
- d. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23

Jangka Waktu Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa permohonan surat keterangan bebas tersebut diproses selama 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Masa Berlaku Surat Keterangan Bebas (SKB)

Masa berlaku surat keterangan bebas adalah sampai dengan tahun pajak yang bersangkutan, jadi misalkan diajukan permohonan surat keterangan bebas di tahun 2017 dan disetujui, maka surat keterangan bebas tersebut berlaku sampai dengan akhir 2017 sesuai pada pasal 6. Perlu diketahui juga bahwa permohonan surat keterangan bebas juga hanya berlaku untuk satu jenis pajak penghasilan saja, sehingga jika ingin mendapatkan surat keterangan bebas atas PPh 22 dan surat keterangan bebas atas PPh 23 maka harus mengajukan 2 buah permohonan.

Syarat Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Sesuai pasal 4 dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013 disebutkan bahwa syarat pengajuan surat keterangan bebas adalah :

- a. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelum tahun pajak diajukan permohonan surat keterangan bebas
- b. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk PPh Final disertai lampiran jumlah peredaran bruto usaha setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukan surat keterangan bebas
- c. Menyerahkan dokumen pendukung seperti Surat Perintah Kerja (SPK), surat keterangan pemenang lelang dari instansi pemerintah atau dokumen pendukung yang sejenis lainnya.
- d. Ditandatangani oleh wajib pajak atau jika permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak maka wajib dilampiri surat kuasa khusus

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Legalisir Surat Keterangan Bebas

Pada saat wajib pajak akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka wajib pajak berhak mengajukan legalisir surat keterangan bebas yang sudah diperoleh dari kantor pajak. Permohonan legalisir surat keterangan bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdaftar, dengan syarat :

- a. Menunjukkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
- b. Menyerahkan bukti penyetoran pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- c. Mengisi identitas wajib pajak pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam surat keterangan bebas.
- d. Ditandatangani oleh wajib pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
- e. Fotokopi surat keterangan bebas diajukan dalam rangkap 3, yaitu:
 - 1) Satu lembar untuk kantor pelayanan pajak terdaftar.
 - 2) Satu lembar untuk diserahkan wajib pajak kepada wajib pajak pemotong dan/atau pemungut.
 - 3) Satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar.
 - 4) Legalisasi fotokopi surat keterangan bebas dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan fakta dan bukti dari objek yang diteliti, dimana penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan tersebut maka peneliti mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat pada objek penelitian. Berdasarkan bukti-bukti dari objek tersebut, kemudian akan dianalisis guna untuk menjawab masalah penelitian. Fokus Penelitian ini menggunakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan surat keterangan bebas pajak (SKB) untuk meminimalkan Beban pasal 23 pada PT.X Surabaya

tahun 2019.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan desain studi kasus yaitu dengan cara mengumpulkan data yang Valid dari sumber yang diperoleh dari karyawan perusahaan tersebut. Adapun data yang diperoleh adalah, Pencatatan pendapatan komisi tahun 2019, bukti laporan SPT pada tahun 2019, Surat keterangan bebas (SKB), Invoice, Kwitansi, NPWP, Surat bukti potong PPh 23, bukti bayar Pph final.

Adapun langkah – langkah di gunakan teknik analisis data sebagai berikut :

- Mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam penulisan Pencatatan pendapatan komisi tahun 2019, bukti laporan Spt pada tahun 2019, Surat keterangan bebas (skb), Invoice, Kwitansi, NPWP, Surat bukti potong PPh 23 , bukti bayar Pph final.
- Menerapkan pajak pada saat transaksi komisi keluar untuk di tagihkan ke agent yang bersangkutan.
- Melakukan analisis prosedur penerapan pajak pasal 23 menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) Ke agent yang berkerja sama.
- Terjadinya pemotongan 2% pada komisi yang terjadi pada saat transaksi berlangsung yaitu PPh 23.
- Dari hasil analisis tersebut tentang fenomena yang belum paham adanya manfaat surat keterangan bebas pajak pada agent lain dikarenakan banyak yang tidak pahamnya manfaat surat keterangan bebas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. X didirikan oleh Putera Bangsa Indonesia kelahiran Kota Surabaya yang Karir dimulai ketika bergabung dengan Agency Property Terkemuka di Indonesia. Pada bulan Oktober 2000. Selama kurang lebih 12 tahun di Agency Property, banyak penghargaan yang telah diraih. Baik penghargaan secara individu.

Karirnya makin meningkat ketika bergabung dengan Harcourts Pratama – Citraland Surabaya pada November 2012. Di tempat ini, beliau dipercaya sebagai Office Manager dan bertugas untuk kantor tersebut serta mengembangkannya. Pengelolaan kantor meliputi :

Perekrutan Marketing baru (broker), Pelatihan dan mentoring marketing, Manajemen operasional kantor, Pemasaran produk melalui berbagai media masa. Dengan dukungan dari staff manajemen dan tim marketing yang solid, kantor Harcourts Pratama terus berkembang dan bisa berprestasi di tingkat nasional.

Kemajuan yang luar biasa ini, tidak membuat cepat berpuas diri. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pendiri PT. X mengundurkan diri dari Harcourts Pratama untuk memenuhi keinginannya mencari tantangan dan melihat peluang bisnis di bidang properti.

Pada tanggal 7 Januari 2014, secara resmi mendirikan perusahaan yang merupakan salah satu bagian dari PT. X dan menciptakan beberapa program guna mendukung perkembangan PT. X sebagai induk perusahaan. PT. X saat ini berkantor pusat di Kota Surabaya. Dengan berjalannya waktu semakin

berkembang dan berhasil mencapai beberapa prestasi yang luar biasa tahun 2014.

Analisis Data dan Pembahasan

Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan / atau Pemungutan

SKB adalah surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Jenis-Jenis SKB dari Pemotongan PPh

SKB dari pemotongan PPh dapat diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak atas permohonan dari wajib pajak untuk mendapatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas jenis pajak :

- a. Pemotongan PPh Pasal 21
- b. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh:
 - 1) Bendahara
 - 2) Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu
 - 3) Impor
- c. Pemotongan PPh Pasal 23
- d. Pemotongan PPh Final, atas:
 - 1) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh
 - 2) Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
 - 3) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23

Untuk meminta pembebasan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, 22 dan Pasal 23), wajib pajak harus tengah mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian.

Syarat Permohonan SKB

Wajib pajak yang berpenghasilan bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelum tahun pajak diajukan permohonan, untuk wajib pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya SKB.

- b. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk wajib pajak yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat diajukannya SKB.
- c. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti surat perintah kerja, surat keterangan pemenang lelang dari instansi pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
- d. Ditandatangani oleh wajib pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Khusus. permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23. Jika permohonan pembebasan telah diajukan kepada pemerintah, wajib pajak dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban, jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui.

Penjelasan gambar peredaran bruto yang tertera pada Gambar 4.2 Gambar Penghasilan Bruto, PPh Final, PPh 23 sebagai berikut:

Lampiran Pajak Tahun 2019 PPh 23 PT.Pillar Nusa Properindo untuk mengetahui pendapat PT.Pillar Nusa Propertindo, berikut ini :

Alamat	Peredaran Bruto (Tahun 2019)	PPh Final 0,5% Dibayar	PPh 23
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 5,350,000	Rp 26,750	Rp 57,000
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 34,694,200	Rp 173,471	Rp 225,541
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 30,385,600	Rp 151,928	Rp 471,646
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 41,790,800	Rp 208,954	Rp 754,187
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 84,100,000	Rp 420,500	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 7,433,800	Rp 37,169	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 9,178,400	Rp 45,892	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 37,115,400	Rp 185,577	Rp 1,508,374
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 14,410,000	Rp 72,050	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 12,193,200	Rp 60,966	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 69,235,600	Rp 346,178	
JL. KENDANG SARI BLOK D/16 RT.005 RW. 002, KENDANG SARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA - 60292	Rp 1,325,000	Rp 6,625	
JUMLAH	Rp 347,212,000	Rp 1,736,060	Rp 3,016,748

Gambar 1: Penghasilan Bruto, PPh Final, PPh 23

Pada bulan Januari PT X pendapatan peredaran bruto Rp. 5.350.000 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp. 5.350.000 x 0,5 % = Rp. 26.750 pajak yang harus dibayar ke Negara masa januari. seharusnya PT.X tidak di potong PPh 23 dikarena kan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB)

Namun masih saja ada pemotongan dari pihak agent yang kerja sama. kemudian untuk beredaran bruto bulan febuari pada PT.X sebesar Rp.34.694,200 maka terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.34.694,200 x 0,5 % = Rp. 173.471 pajak yang harus dibayarkan ke Negara masa febuari. seharusnya PT.X tidak di potong PPh 23 dikarenakan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Namun masih saja ada pemotongan dari pihak agent yang kerja sama di bulan Febuari. Selanjutnya bulan maret pendapatan beredaran bruto pada PT.X sebesar Rp.30.385.600 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.30.385.600 x 0,5 % = Rp. 151.928 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa maret.

Seharusnya PT.X tidak di potong PPh 23 dikarena kan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Namun masih saja ada pemotongan dari pihak agent yang kerja sama bulan maret. Selanjutnya Pada bulan April PT X pendapatan beredaran bruto Rp.41.790.800 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.41.790.800 x 0,5 % = Rp.208.954 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa April. seharusnya PT.X tidak di potong PPh 23 dikarena kan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Namun masih saja ada pemotongan dari pihak agent yang kerja sama bulan April. Pada bulan Mei PT X pendapatan bruto Rp.84.100.000 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.84.100.000 x 0,5 % = Rp. 420.500 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa mei . Pada bulan Juni PT X pendapatan beredaran bruto Rp. 7.433.800 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp7.433.800 x 0,5 % = Rp. 37.169 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa Juni.

Pada bulan Juli PT X pendapatan beredaran bruto Rp.9.178.400 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp. 9.178.400 x 0,5 % = Rp.45.892 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa Juli. Pada bulan Agustus PT X pendapatan beredaran bruto Rp.37.115.400 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.37.115.400 x 0,5 % = Rp.1885.557 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa Agustus.

Seharusnya PT.X tidak di potong PPh 23 dikarena kan mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Namun masih saja ada pemotongan dari pihak agent yang kerja sama bulan Agustus. Pada bulan September PT X pendapatan beredaran bruto Rp.14.410.000 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.14.410.000 x 0,5 % = Rp.72.050 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa september.

Pada bulan Oktober PT X pendapatan beredaran bruto Rp.12.193.200 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.12.193.200 x 0,5 % = Rp.60.900 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa Oktober.

Pada bulan November PT X pendapatan beredaran bruto Rp.69.235.600 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.69.235.600 x 0,5 % = Rp.346.178 pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa November.

Pada bulan Desember PT X pendapatan beredaran bruto Rp.1.325.000 terkena pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dari Rp.1.325.000 x 0,5 % = Rp.6.625. pajak yang harus dibayar kan ke Negara masa Desember.Total keseluruhan selama 1 tahun pendapatan PT.X sebesar Rp. 347.212.000 di bawah PTKP. Berikut ini bukti lapor SPT tahunan 2019.

Berdasarkan penelitian , penulis mencoba menganalisis tentang prosedur

pengajuan penggunaan surat keterangan bebas pajak , bahwa wajib pajak harus melakukan perencanaan terlebih dahulu agar tidak terpotongnya PPh 23 berkelanjutan .

Dalam prosedur penggunaan Surat keterangan Bebas (SKB) penulis menemukan beberapa hambatan yang akan merepotkan bagi wajib pajak diantaranya:

- A. Terjadinya pemotongan terlebih dahulu sebelum komisi atau sudah terlanjur dilaporkan ke pajak seharusnya ada konfirmasi lebih lanjut.
- B. Wajib Pajak harus melampirkan bukti lampiran bukti lapor SPT tahunan, sedangkan wajib pajak belum bisa menunjukkan karenakan pada akhir tahun masih ada transaksi berjalan.
- C. Bukti lapor PPh 23 terkadang tidak di berikan kepada wajib pajak yang dipotong sehingga tidak ada arsip sebenarnya.
- D. dipotong PPh final 0,5 % karena ada kekeliruan dipotong kembali PPh 23 2 % dari pendapatan transaksi komisi.

Faktor diatas tentu menjadi suatu kendala dan berdampak bagi wajib pajak. Adapun yang di hadapi bagi wajib pajak:

- A. Wajib pajak direpotkan pemindahan bukuan/pengembalian pajak karena ada pemotongan terlebih dahulun.
- B. Terjadinya beban pajak yang sangat tinggi seharusnya wajib pajak berusaha meminimalkan pajak PPh 23 yang terjadi .
- C. Bukti lapor PPh 23 terkadang tidak dapat diterbitkan atau di berikan kepada wajib pajak yang dipotong sehingga wajib pajak tidak ada bukti atau arsip perpajakan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian adapun penyelesaian untuk masalah atau kendala yang dihadapi wajib pajak tersebut ialah :

- A. Saat terjadinya transaksi keluar pihak agent yang berkerja sama harus menginformasikan dahulu jika memotong PPh 23 wajib pajak yang dipotong.
- B. Wajib pajak harus laporkan SPT Tahunan yang sementara untuk melampirkan bukti laporan yang dibuat nihil sehingga memudahkan transaksi yang berjalan tetapi wajib pajak melakukan pembetulan pelaporan SPT Tahunan tersebut ketika laporan perusahaan sudah selesai dikerjakan.
- C. Wajib pajak harus lebih dahulu membayar PPh pasal 4 ayat 2 dan bukti bayarnya harus dilampirkan saat pengajuan komisi terjadi sehingga tidak di potong PPh pasal 23.
- D. Melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) terlebih dahulu atau memberikan info kepada agent luar PT. X memiliki SKB.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam prosedur penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) diketahuui masih banyak ditemui kurang pemahannya penggunaan dan manfaat penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) bahkan merugikan bagi wajib pajak, tentunya ini menjadi masalah serius yang dihadapi wajib pajak diantaranya:

1. Untuk penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk meminimalkan Beban pajak PPh 23 masi belum berjalan dangan baik dikarenakan masi ada kekeliruan yang terjadi.
2. Wajib pajak bisa membuat SPT Tahunan Nihil untuk memudahkan pengajuan SKB, hal ini berlaku jika wajib pajak belum menyelesaikan laporan keuangan dikarenakan pada akhir tahun masih ada transaksi yang berjalan. Dengan syarat wajib pajak harukan melakukan pembetulan untuk melaporkan SPT Tahunan tersebut bila laporan keuangan sudah selesai.
3. Terjadinya Membayaran PPh 23 Selama 1 Tahun Sebesar Rp.3.016.748 seharusnya tidak perlu di potong

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat di berikan sebagai masukan :

- Lebih ditegaskan jika terjadinya pemotongan yang seharusnya tidak dipotong. Agar tidak terulang lagi masalah tentang perpajakan, sehingga pemahaman dan penggunaan surat keterangan bebas dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
- Seharusnya pembayaran PPh final 0,5% yang dibayarkan diawal sebagai syarat legalisir SKB bisa dibayarkan setelah transaksi terjadi, atau pada tanggal 10 bulan berikutnya. Mengikuti ketentuan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto.
- Untuk bukti potong PPh pasal 23 seharusnya segera di berikan pada saat terjadinya pemotongan, agar tidak terkena teguran.
- Jika PPh pasal 23 telah terjadi pemotongan dan sudah dilaporkan ke pajak,maka seharusnya pembatalan pemotongan PPh pasal 23 bisa dilakukan, karena Surat Keterangan Bebas (SKB) bisa dipergunakan sesuai dengan manfaatnya.
- Seharusnya di Aplikasi e – Bupot Pihak kantor pelayananmemberikan data list yang tidak dapat dipotong Secara otomatis karena wajib pajak sudah melaporkan spt tahunan yang nihil dan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bardjo,2011, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisien Beban Pajak Penghasilan Bardjo Sugeng* .Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

brevet A Dan B, 2019, ” *Pph 23*, Mitrakom, Surabaya

E. Suandy,2011, *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi 3 Andi Offset, Yogyakarta

Erly Suandy, (2011) *.Hukum Pajak*. Salemba Empat

Ismail, Wahyu Adi 2015,*Prosedur pengajuan Bebas (SKB) PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasil wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas*

tanah dana/atau bangunan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Mardiasmo 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV ANDI
- Orozco, 2008, Orozco, *Tax management*, Edisi Revisi 2004, Jakarta
- Priantara. Diaz. 2012. *Perpajak Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- R. N. Pertiwi, D. F. Azizah, 2014 *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, " J. Perpajak.*, Universitas Gema Surabaya.
- Resmi, 2011 . *Perpajakan dan strategi Bisnis*, Dbw Tax Center. Jakarta
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Indeks
- Trisnawati, Lika. 2015 *,Keabsahan Surat Keterangan bebas pajak sebagai syarat permohonan balik nama sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan*, Universitas Narotama Surabaya
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Mitra Wacana Media : Jakarta
- Waluyo 2009, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo 2011, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, 2011 *Perpajakan Seri PPh Badan*, Mitra wacana Media, Jakarta
- Zuhdi, 2015, *Tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 impor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.